

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adjie, Habib. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Erna Sri Wibawanti, R. Murjiyanto. Hak Atas Tanah dan Peralihannya. Yogyakarta: Liberty, 2013.
- Fajar ND, Mukti, et al. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadikusuma, H. Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Hamzah, Amir. Metode Penelitian Kepustakaan Library Research Kajian Filosofis, Teoritis, dan Aplikasi Proses dan Hasil. Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2022.
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Bandung: Alfabeta, 2017.
- J. Satrio. Hukum Harta Perkawinan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mustofa. Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT. Yogyakarta: KaryaMedia, 2014.
- R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Sahnan. Hukum Agraria Indonesia. Malang: Setara Press, 2016.
- Sampara, Said, et al. Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa, 2002.
- Sugono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sulhan, Irwansyah Lubis, et al. Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum). Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Supriadi. Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Syaifudin, Muhammad, et al. Hukum Perceraian, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.

Tong Kie, Tan. Studi Notariat & Serba-Serbi Praktik Notaris. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5491);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 6401);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 59).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak

Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 6630);

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 175);

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi

Hukum Islam;

Jurnal

Ananda Fitki Ayu Saraswati. Dilematis Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Parate Executie dan Eksekusi Melalui Grosse Akta, Jurnal Rapertorium, Volume II No. 2, (Juli- Desember 2015): 51-59.

<https://www.neliti.com/publications/213089/dilematis-eksekusi-hak-tanggungan-melalui-parate-executie-dan-eksekusi-melalui-g>.

Asep Ubaidillah. “Review Peran Notaris dalam Pembagian Harta Gono Gini pada Proses Perceraian”, Jurnal Qonun, Vol. 2, No. 01, (2022): 46-48, <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/qonuni/article/view/726>.

Layyin Mahfiana. “Konsepsi Konsepsi Kepemilikan dan Pemanfaatan Hak atas Tanah Harta Bersama antara Suami Istri, Buana Gender, Vol.I, Nomor I, ISSN: 2527-8096, (Januari-Juni 2016): 30-44. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/buana-gender/article/view/65>.

Nely Melinda. “Pemahaman Masyarakat tentang Harta Bersama Perspektif Hukum Positif Indonesia ”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 2, (Juli-Desember, 2023): 142-163, <https://doi.org/10.32332/syakhshiiyyah.v3i2.7512>.

Ongky Alexander. “Efektifitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian dalam Prespektif Yuridis Sosiologi”, Jurnal El-Ghiroh, Vol. XVI, Nomor 01, (Februari, 2019): 113 – 129, <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/el-ghiroh/article/view/70>.

Tesis

Arisandi, Desi. “Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama Bagi Pasangan Bercerai Tanpa adanya Perjanjian Kawin”, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Internet

Kamus Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/hak>, (diakses pada tanggal 10 Februari 2025)

Tinjauan Keadilan Dalam Akta Perdamaian, <https://pa-tanahgrogot.go.id/berita-pengadilan/pengumuman-pengadilan/266-tinjauan-asas-keadilan-dalam-putusan-akta-perdamaian>, (diakses pada tanggal 22 Maret 2025).